



## MEMBANGUN NKRI DENGAN MULTIKULTURALISME

Mohammad Mulyadi\*)

### Abstrak

*Multikulturalisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan semangat multikulturalisme, yaitu bagaimana kelompok-kelompok etnik semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu usaha untuk menjaga keharmonisan multikulturalisme adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara berbagai suku bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa.*

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki etnis yang beragam. Hingga tahun 2016, tercatat sekitar 1.340 jenis suku di Indonesia. Oleh karenanya multikulturalisme menjadi sebuah keniscayaan di Indonesia. Namun akhir-akhir ini spirit keutuhan negara terancam oleh dampak negatif multikulturalisme tersebut. Banyak bibit konflik yang mengatasnamakan etnis, yang justru seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

Perbedaan etnis seringkali menjadi akar konflik, misalnya perbedaan antara suku Dayak dan suku Madura, biasanya konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Misalnya suku Madura memiliki perilaku yang langsung merespons dengan amarah dan cenderung melalui kekerasan, hal ini menimbulkan konflik dengan suku lain. Konflik antara suku Dayak dan suku Madura pernah menjadi kerusuhan yang

\*) Peneliti Madya Sosiologi Politik pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: mohammadmulyadi@yahoo.co.id



berskala besar, di mana perbedaan budaya jelas menjadi alasan perang antar-ke dua suku ini.

Salah satu peristiwa yang kembali ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah sentimen terhadap etnis Cina. Berbagai berita, baik itu fakta maupun bohong (*hoax*) dengan mudah dapat ditemui di media sosial. Peristiwa yang terbaru adalah sentimen etnis Cina dalam pemilukada DKI Jakarta.

Masalah multikulturalisme ini perlu dikaji secara tuntas, agar masyarakat Indonesia tidak terbuai dan hanyut dalam slogan, seolah-olah keanekaragaman itu lebih merupakan berkah dan bukan pekerjaan rumah. Hal ini harus dipahami oleh segenap masyarakat Indonesia. Dalam kerangka inilah letak relevansi multikulturalisme untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Konsep Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme bukanlah kosa kata baru bagi sejarah Indonesia. Substansi multikulturalisme lekat kaitannya dengan lahirnya NKRI. Multikulturalisme didefinisikan secara umum oleh banyak kalangan sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Multikulturalisme merupakan ideologi yang lahir dari keragaman struktur budaya dalam masyarakat yang membentuk suatu masyarakat yang multikultur. Kehidupan masyarakat multikultural rentan adanya konflik sosial. Oleh karena itu, terbentuklah multikulturalisme sebagai acuan utama terwujudnya kedamaian di tengah keragaman, yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masing-masing suku bangsa yang sangat jelas dan belum tercampur oleh warna budaya lain membentuk masyarakat yang lebih besar.

Semangat multikulturalisme adalah mencoba menggugat pertanyaan pokok tentang bagaimana kelompok-kelompok etnik dan budaya itu semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Lebih jelasnya adalah, bagaimana misalnya kelompok-kelompok etnik Bugis, Makassar, Batak, Minang, Betawi, Sunda, Jawa, China, Bali, Ambon, Manado, Papua atau yang beragama Islam, Hindu, Khong Hu Cu, Buddha, Kristen, Katolik, itu semuanya mampu hidup berdampingan dalam sebuah proses sosial yang di satu pihak memberi tempat bagi terpeliharanya identitas lokal dan kepercayaan partikularnya masing-masing, dan di pihak lain memberi kesempatan bagi sebuah proses terjadinya integrasi sosial.

Ide multikulturalisme menurut Taylor (1994: 25) merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*). Gagasan ini menyangkut pengaturan hubungan sosial atau relasi antara kelompok etnis. Sedangkan Suparlan (2008: 726) mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Oleh karena itu, konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa (*ethnic*) atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan etnisitas dalam kesederajatan.

Multikulturalisme merupakan paradigma yang baik dalam upaya merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konfliktual. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Melalui multikulturalisme masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Meskipun berada dalam perbedaan, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi konflik sosial yang terjadi selama ini. Dengan

demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, *gender*, bahasa, ataupun agama. Sedangkan fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini individu dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya.

## Membangun NKRI dengan Multikulturalisme

Ada dua sejarah penting bangsa Indonesia, *pertama*, adalah Ikrar Sumpah Pemuda pada Tahun 1928 dan *kedua*, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. Ikrar “Sumpah Pemuda” menegaskan tekad dengan bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ketika merdeka para pejuang dan pendiri bangsa ini memilih bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa bersejarah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang secara sosial dan budaya merefleksikan keberadaan multikulturalisme di tanah air. Kenyataan sejarah melalui serangkaian peristiwa sosial dan budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu “berbeda-beda dalam kesatuan” pada lambang negara Indonesia.

Multikulturalisme tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Saat ini, Indonesia sedang diuji dengan adanya ancaman akan keberadaan multikulturalisme. Dalam masyarakat banyak muncul sifat atau sikap egosentrisme, baik atas nama agama, suku, atau politik. Sifat atau sikap tersebut dapat berubah menjadi eksklusivisme dan pada akhirnya memicu perpecahan, apalagi jika ditambah dengan himpitan masalah ekonomi, sosial, serta budaya.

Salah satu tantangan rakyat Indonesia saat ini adalah bagaimana menjadikan multikulturalisme itu sebagai kekuatan, yang tentunya nanti bisa membawa rakyat pada persatuan dan kesatuan bangsa. Multikulturalisme masyarakat Indonesia dapat menimbulkan masalah tentang sulitnya membangun masyarakat

Indonesia yang terintegrasi pada tingkat lokal dan tingkat nasional. Salah satu masalah yang ada dalam masyarakat terkait multikulturalisme adalah konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemerintah untuk menghindari perpecahan akibat dampak negatif multikulturalisme.

Menurut Din Syamsudin selaku Presiden Komite Keagamaan dan Perdamaian Asia dalam acara *World Culture Forum* (WCF) 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2016 di Nusa Dua Bali, bahwa untuk membangun persatuan melalui multikulturalisme, *pertama*, harus ada kesadaran tentang pentingnya multikulturalisme, yang dalam pandangan Islam adalah hukum (ketetapan) Tuhan, dan *kedua*, mengembangkan budaya dalam masyarakat untuk saling menghargai dan tenggang rasa. Memang ada perbedaan di antara kelompok masyarakat, tetapi di sisi lain, juga ada persamaan, oleh karena itu penting mencari titik temunya. Indonesia sangat beruntung karena pendiri bangsa ini telah mewariskan dua pedoman yang bisa menyatukan kemajemukan dalam masyarakat, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu semangat kebersamaan, kerjasama, dan berbagi atas nama kemanusiaan tanpa memandang perbedaan untuk menguatkan persatuan di antara masyarakat dengan budaya yang beragam.

Menurut Magnis-Suseno (2005: 216), bangsa Indonesia yang multikultur mutlak harus dipandang dari kacamata multikulturalisme, Indonesia hanya dapat bersatu, bila pluralitas yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya, penegakan kesatuan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang “yang baik” kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu, diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional, integrasi nasional, dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.

Dengan adanya struktur masyarakat Indonesia dan masalah multikultural, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dengan cara tetap menghormati pranata, struktur, dan kebiasaan yang ada (*social sustainability*). Indonesia yang multikultural ini akan tetap bertahan sebagai sebuah negara kesatuan, apabila elemen-elemen pendukung kebersamaan tetap dipertahankan. Kecenderungan dominasi mayoritas (suku dan agama) harus ditata kembali agar rasa memiliki bangsa ini tidak luntur. Gejala yang terjadi di berbagai daerah seperti Aceh, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua, membutuhkan penanganan yang serius. Kelalaian tidak memperhatikan multikultural bangsa, di masa mendatang akan menjadi bom waktu yang sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Konflik antar-suku bangsa dewasa ini disebabkan antara lain tidak ada atau kurangnya pemahaman dan penghargaan atas suku bangsa lain, sehingga salah satu usaha untuk menanggulangi konflik ini adalah dengan usaha melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara suku bangsa. Karena salah satu keuntungan ini adalah bisa menjadikan identitas suatu bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa. Melalui pendidikan kita dapat mengubah cara berpikir kita dengan pandangan yang lebih baik demi terciptanya lingkungan sosial yang harmonis.

## Penutup

Multikulturalisme merupakan sebuah paradigma dalam menjaga keharmonisan hubungan antaretnik yang tidak saja perlu dan penting, tetapi juga merupakan jawaban atas kegagalan kita di masa lalu dalam mengelola masyarakat majemuk di Indonesia. Perbedaan merupakan keniscayaan yang mesti dan harus diterima oleh semua kelompok etnis di tanah air. Dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat akan menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan.

Keragaman ini seperti ditunjukkan oleh Indonesia yang merupakan negara-bangsa yang terdiri atas beragam etnis, agama, dan bahasa. Keragaman ini perlu dikelola secara serius dalam suatu bentuk tatanan nilai yang dapat dibagi bersama secara harmonis. Oleh karena itu, DPR RI sebagai sebuah lembaga legislatif perlu merumuskan dan menetapkan undang-undang yang mengatur tentang hubungan sosial antaretnis yang dapat menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Referensi

- Budiman, Hikmat (ed). (2005). *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Interseksi/ The Interseksi Foundation.
- Hefner, Robert W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutington, Samuel P. (2003). *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- “Membangun Persatuan dengan Multikulturalisme”, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/10/membangun-persatuan-dengan-multikulturalisme>, diakses 17 Mei 2017.
- “Mengulik Data Suku di Indonesia”, <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127>, diakses 18 Mei 2017.
- Suparlan, Parsudi. (2008). *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: YPKIK.
- Suseno, Franz Magnis. (2005). *Berebut Jiwa Bangsa-Dialog Persaudaraan dan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.
- Taylor, C. et all (1994). *Multiculturalism, Examining the politics of Recognition*. United Kingdom: Princeton University Press.